



Australian Government

---

# LAPORAN MISI SUPERVISI BERSAMA PELAKSANAAN PROGRAM KOMPAK DI DAERAH

---

JULI 2017

Laporan Misi Supervisi Bersama  
**Pelaksanaan Program KOMPAK di Daerah**  
**Juli - 2017**

Jalan Diponegoro No.72  
Jakarta Indonesia, 10320  
Tel +62 21 8067 5000  
Fax +62 21 3190 3090  
Email [info@kompak.or.id](mailto:info@kompak.or.id)  
[www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

---

---

LAPORAN MISI  
SUPERVISI BERSAMA  
**PELAKSANAAN**  
**PROGRAM KOMPAK**  
**DI DAERAH**


JULI 2017



**Turut Berpartisipasi dalam Kegiatan Misi Supervisi Bersama –  
Pelaksanaan Program KOMPAK di Daerah:**




**Aryawan Soetiarso Poetro**  
Direktur Otonomi Daerah  
Bappenas




**Mahatmi P. Saronto**  
Direktur Tenaga Kerja dan  
Perluasan Kesempatan Kerja  
Bappenas



**Vivi Yulaswati**  
Direktur Penanggulangan  
Kemiskinan dan  
Kesejahteraan Sosial  
Bappenas




**Samsul Widodo**  
Kepala Biro Perencanaan  
Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi



**Herbert H.O. Siagian**  
Asisten Deputi Urusan  
Pemberdayaan Desa,  
Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan



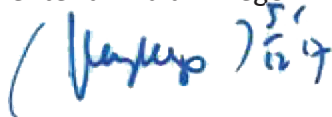
**Michelle Lowe**  
Counsellor Bidang  
Pembangunan Manusia,  
Kedutaan Australia



**Nelson Simanjuntak**  
Kepala Pusat  
Fasilitasi Kerjasama,  
Kementerian Dalam Negeri



**Rukijo**  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perimbangan Keuangan,  
Kementerian Keuangan



(Handwritten signature) 25/12/19

# Daftar Isi

---

Ringkasan	4
Pendahuluan	6
Kemajuan Pelaksanaan Program: Observasi, Pembelajaran, Dan Rekomendasi	9
Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Ntb	10
<i>Relevansi Program, Keterlibatan Dan Komitmen Daerah</i>	10
<i>Kemajuan Dan Capaian</i>	11
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan	14
<i>Relevansi Program, Keterlibatan Dan Komitmen Daerah</i>	14
<i>Kemajuan Dan Capaian</i>	15
Pembelajaran Dan Rekomendasi Peningkatan Pelaksanaan Program Kompak	18
Rekomendasi Prioritas Baru	21
Ringkasan Dan Kesimpulan	23
Lampiran 1. Kerangka Acuan	26
Lampiran 2. Jadwal Kegiatan Kabupaten Lombok Utara	28
Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Kabupaten Pangkajene Kepulauan	31
Lampiran 4. Daftar Peserta	35



RINGKASAN



# RINGKASAN

---

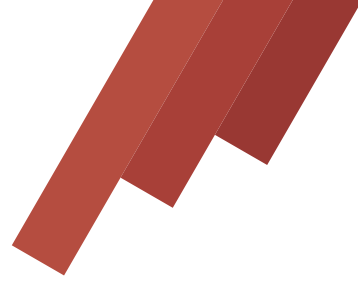
Tatakelola Program KOMPAK mengatur perlunya misi supervisi bersama oleh Pemerintah Indonesia (diwakili oleh anggota Komite Teknis), Pemerintah Australia (diwakili oleh pejabat/staf Kedutaan Besar), dan Manajemen Program KOMPAK secara teratur—setidaknya dua kali dalam setahun—terhadap pelaksanaan program di daerah. Dokumen ini adalah laporan misi supervisi ke Kabupaten Lombok Utara (Provinsi NTB) dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Provinsi Sulawesi Selatan) pada tanggal 5–7 Juni 2017.

Secara umum misi supervisi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, termasuk kemajuan yang dicapai, identifikasi indikasi awal praktik-praktik baik, dan pembelajaran untuk perbaikan. Fokus utama misi supervisi yang pertama ini adalah pada tema pelayanan dasar.

Program KOMPAK dirancang dengan tujuan utama agar masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi. Strategi dukungan Program KOMPAK diarahkan untuk penguatan sistem terkait tatakelola pelayanan dasar, termasuk mendorong kerjasama multi-pihak dan multi-level yang terstruktur untuk capaian tujuan perluasan akses dan peningkatan mutu pelayanan dasar.

Fokus dukungan dan rencana kerja Program KOMPAK dirasakan sangat relevan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Pemerintah daerah menunjukkan penerimaan, rasa memiliki, dan keterlibatan yang sangat baik terhadap pelaksanaan dukungan program. Tim misi supervisi memberikan apresiasi terhadap hubungan dan kerjasama yang sangat baik antara pemerintah daerah dan tim KOMPAK.

Secara umum dari kunjungan ke dua daerah ini tim misi supervisi memperoleh kesan bahwa Program KOMPAK telah dapat mencapai kemajuan yang berarti. Hasil-hasil kegiatan menunjukkan indikasi sejalan dengan capaian yang diharapkan. Indikasi peningkatan dalam pelayanan di unit pelayanan, seperti kantor camat dan puskesmas/RSUD di kedua kabupaten mulai terlihat. Inisiatif dukungan program untuk mengarusutamakan pelayanan dasar dalam pembangunan desa mulai terlihat dengan meningkatnya alokasi anggaran belanja desa untuk pelayanan dasar. Inisiatif bersama lembaga mitra program dan pemerintah daerah juga diperkuat untuk mendorong



---

keterlibatan kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan guna memperoleh manfaat dari pembangunan di tingkat desa, seperti kepemilikan identitas hukum dan bantuan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Beberapa dari inisiatif kegiatan pilot dukungan program juga telah direplikasi oleh pemerintah daerah dengan anggaran sendiri (APBD), antara lain—sebagai ilustrasi: inisiatif percepatan capaian kepemilikan identitas hukum di kedua kabupaten dan pengembangan sistem informasi desa (Lombok Utara). Terkait Sistem Informasi Desa (SID), direncanakan agar dapat dikembangkan interkonektivitas dengan sistem informasi di tingkat kabupaten.

Tim misi supervisi juga mengidentifikasi pembelajaran dari pelaksanaan program untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah peningkatan yang diperlukan. Rekomendasi bagi perbaikan tersebut mencakup: perlunya harmonisasi dukungan kebijakan di tingkat pusat dan daerah; peningkatan kapasitas yang berkesinambungan; dokumentasi sistematis praktik-praktik baik, dan dukungan terhadap replikasi hasil program oleh daerah; optimalisasi peran provinsi; dan saran-saran untuk penyelenggaraan misi supervisi berikutnya.

Selain mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai, tim misi supervisi juga merekomendasikan Program KOMPAK untuk mempertimbangkan usulan-usulan prioritas baru yang disampaikan daerah, yaitu dukungan untuk: peningkatan tatakelola di sektor pendidikan; akreditasi puskesmas, termasuk pengelolaan keluhan/pengaduan terkait pelayanan; analisis anggaran kecamatan terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan; operasionalisasi konsep “Desa Mandiri” (Kabupaten Pangkajene Kepulauan); dan perancangan model pelayanan dasar yang inovatif sesuai dengan konteks wilayah kepulauan yang mempunyai karakteristik tantangan tersendiri.



# PENDAHULUAN

Sesuai dengan RPJMN 2015–2019, salah satu upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah adalah melalui strategi peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, khususnya masyarakat berpendapatan 40 persen terendah. Adapun pelayanan dasar yang menjadi fokus yakni pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk setidaknya 6 urusan pemerintahan wajib diantaranya identitas hukum, perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Program KOMPAK mendukung upaya tersebut melalui penguatan sistem dan kelembagaan yang berfokus pada:

- 1 Peningkatan efisiensi dan efektivitas tatakelola penyelenggaraan pelayanan dasar.
- 2 Peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
- 3 Partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan pelayanan dasar melalui pemberdayaan.

Tatakelola Program KOMPAK mengatur perlunya misi supervisi bersama oleh Pemerintah Indonesia (diwakili anggota Komite Teknis), Pemerintah Australia (diwakili pejabat/staf Kedutaan Besar), dan Manajemen Program KOMPAK secara teratur—dua kali dalam setahun—terhadap pelaksanaan program di daerah. Pada 5–7 Juni 2017 dilaksanakan misi supervisi ke Kabupaten Lombok Utara (NTB) dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan) secara bersamaan oleh dua tim terpisah.

Secara umum misi supervisi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, termasuk kemajuan yang dicapai, identifikasi indikasi awal praktik-praktik baik, dan pembelajaran untuk perbaikan. Fokus utama misi supervisi yang pertama ini adalah pada tema pelayanan dasar.

Ringkasan agenda utama kegiatan selama misi supervisi dijelaskan dalam matriks berikut:

LOKASI	AGENDA UTAMA
Kabupaten Lombok Utara (NTB)	
Tingkat Kabupaten	Pertemuan dengan kepala daerah dan para kepala OPD terkait: relevansi dukungan KOMPAK terkait prioritas daerah, kemajuan pelaksanaan dukungan, umpan-balik
Desa Pemenang Timur	Pelayanan administrasi, data, dan administrasi menggunakan SID, perencanaan desa terkait peningkatan alokasi pelayanan dasar dalam APBDesa.
Kecamatan Pemenang	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang terintegrasi dengan pelayanan administrasi kependudukan.
Desa Loloan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan pelayanan identitas hukum dan administrasi kependudukan melalui istbat nikah, pelayanan terpadu (yandu), dan peran serta di masyarakat.</li><li>▪ Pemanfaatan SID untuk publikasi, pelayanan administrasi, dan transparansi anggaran desa.</li></ul>
Kecamatan Bayan	Peningkatan kapasitas aparat kecamatan selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) untuk pelayanan dasar dan pelayanan PATEN yang terintegrasi dengan pelayanan administrasi kependudukan.
RSUD Tanjung	Proses pelayanan akta kelahiran yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan.

---

## LOKASI

## AGENDA UTAMA

---

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan)

Tingkat  
Kabupaten

Pertemuan dengan kepala daerah dan para kepala OPD terkait: relevansi dukungan KOMPAK terkait prioritas daerah, kemajuan pelaksanaan dukungan, umpan-balik.

Desa  
Mattiro Kanja

- Pelayanan terpadu administrasi kependudukan dan identitas hukum, termasuk istbat nikah, pengurusan KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.
- Keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan di desa.

Kecamatan  
Pemenang

- Pelaksanaan pelayanan terpadu administrasi kependudukan dan identitas hukum, termasuk istbat nikah, Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga.
- Pengarusutamaan pelayanan dasar dalam perencanaan dan penganggaran desa, termasuk dukungan regulasi.

Puskesmas  
Sabutung

- Pelatihan manajemen puskesmas.
  - Pelatihan PTPD berbasis pelayanan dasar.
-

---

KEMAJUAN PELAKSANAAN PROGRAM:  
OBSERVASI, PEMBELAJARAN,  
DAN REKOMENDASI

---

*Sebagai bagian dari percepatan kepemilikan akta kelahiran, setiap bayi lahir di RSUD Tanjung, KLU akan langsung diberi akta kelahiran.*



### Relevansi Program, Keterlibatan dan Komitmen Daerah

Kegiatan dukungan KOMPAK di Kabupaten Lombok Utara dimulai sekitar akhir tahun 2015. Dukungan Program KOMPAK memperoleh penerimaan yang sangat baik oleh Pemkab Lombok Utara, termasuk oleh kepala daerah dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dukungan dari program dirasakan sangat relevan dengan visi-misi Bupati dan prioritas daerah terkait dengan capaian peningkatan pelayanan dasar. Tim misi supervisi menangkap rasa memiliki yang kuat dan keterlibatan aktif jajaran pemerintah daerah terkait dalam pelaksanaan dukungan program.

Secara kelembagaan, koordinasi kerjasama dan dukungan Program KOMPAK diintegrasikan dengan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Utara (SK Bupati No 38A/2017). Walaupun koordinasi formal-reguler TKPKD secara umum dapat lebih ditingkatkan oleh daerah, namun pelaksanaan dukungan KOMPAK terkoordinasikan dengan baik melalui forum lintas-sektor terkait yang dikoordinasikan oleh Sekda atau Bappeda maupun koordinasi dengan masing-masing OPD terkait.

## Kemajuan dan Capaian

Ringkasan: Rencana kerja KOMPAK di Kabupaten Lombok Utara terkait pelayanan dasar lini depan mencakup: dukungan penguatan kecamatan, akselerasi capaian identitas hukum/administrasi kependudukan, dan penguatan tatakelola desa dan partisipasi masyarakat. Bentuk kegiatan termasuk fasilitasi penyusunan kebijakan/regulasi, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan, dukungan pelaksanaan dalam bentuk program pilot, termasuk kerjasama dengan lembaga mitra.

Secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi rencana kerja berjalan dengan baik, dengan sambutan penerimaan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan hasil kegiatan menunjukkan kemajuan yang berarti sejalan dengan capaian yang diharapkan. Dalam pertemuan dengan Tim Misi Supervisi, Bupati Kabupaten Lombok Utara menyampaikan ungkapan apresiasinya untuk dukungan yang diberikan selama ini.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan capaian kemajuan dukungan program yang lebih spesifik disampaikan di bawah ini.

### ◆ Tingkat Kabupaten

Kebijakan dan regulasi: Penerbitan berbagai peraturan (Peraturan Bupati dan SK Bupati) terkait dengan:

- SK Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, dengan fokus utama mendukung koordinasi pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum lintas sektor di wilayah kecamatan (SK Bupati KLU No. 232/25/Pem/2017). Praktik baik ini juga telah direplikasi di Kabupaten Lombok Timur.
- Peraturan Bupati tentang penguatan tatakelola desa, telah ditetapkan 15 Perbup dari target 18 (pengelolaan keuangan, kewenangan desa, sistem informasi desa, pengadaan barang dan jasa di desa, serta pengelolaan keuangan desa)
- Peraturan Bupati tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran.

#### Meningkatkan Kepemilikan Identitas Hukum Bagi Masyarakat Miskin

"Masyarakat kami kesulitan untuk dapat mengakses bantuan dari pemerintah desa seperti 10 rumah layak huni serta 400 jamban bagi keluarga miskin karena banyak warga kami yang belum memiliki identitas hukum seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)," kata Kariadi, Kepala Desa Loloan.

Desa Loloan merupakan desa yang terletak di ujung Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pada 2016, kesadaran masyarakat mengenai identitas hukum masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang mendaftarkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tanpa adanya buku nikah, orang tua tidak dapat mengurus akta kelahiran. Hal ini dapat menjadi lebih rumit jika orang tua bercerai dan menikah lagi.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan mitra strategis KOMPAK, melaksanakan Program Pemenuhan Identitas Hukum Masyarakat Berbasis Desa Melalui Revitalisasi Kearifan Lokal di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Program ini berjalan sejak Juli 2016 dan dilaksanakan di Desa Loloan, Sambik Elen, Bayan, Anyar serta Akaar-Akar di Kecamatan Bayan. Salah satu dari kegiatannya adalah melakukan sidang itsbat nikah yang bertujuan supaya orang tua anak mendapatkan buku nikah sehingga akta kelahiran kemudian dapat diproses.

Pada November 2016, Desa Loloan mengadakan sidang itsbat nikah untuk 27 pasangan dengan pembiayaan swadaya dari masyarakat. Setelah menyadari pentingnya identitas hukum, masyarakat menyuarakan pendapat mereka mengenai pentingnya penganggaran itsbat nikah bagi masyarakat yang tidak mampu. Pendapat ini didukung oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya. "Tahun 2017 ini kami menganggarkan Rp37 juta rupiah dalam APBDes untuk membiayai 50 pasangan melakukan sidang itsbat nikah. Dana tersebut berasal dari Dana Desa," tambah Kariadi.

Dengan melakukan sangkep (musyawarah) desa, pengumpulan dokumen persyaratan, pelayanan keliling, pelayanan terpadu itsbat nikah, serta peningkatan kapasitas remaja untuk Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pada Juni 2017, LPA NTB telah menjangkau 3.695 penerima manfaat di KLU.

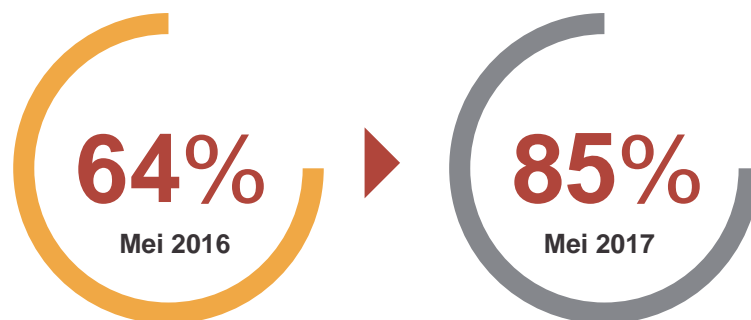
"Dulu banyak anak usia di bawah 18 tahun yang tidak mempunyai akta kelahiran. Tapi sekarang, kepemilikan akta kelahiran bisa mencapai 99 persen. Ini juga terlaksana dengan adanya kerjasama dengan RT, RW, tokoh masyarakat, kader, posyandu, kepala sekolah dan guru-guru yang ikut dilibatkan dalam kelompok kerja identitas hukum. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran KOMPAK," tutup Sundawati, Kasie Pemerintahan Desa, Kecamatan Bayan.

- SK Bupati tentang penetapan kecamatan sebagai lokasi PATEN.

Standar Pelayanan Minimum (SPM): Pengintegrasian SPM dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016–2021. Selain itu, Sekda bersama pimpinan OPD teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dll menandatangani Pakta Integritas untuk mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan penganggaran OPD.

Inovasi unit layanan: Jaring PEKAT (penjaringan akta kelahiran melalui Jalur pendidikan, kesehatan dan masyarakat), yaitu pelembagaan kerjasama multi-pihak/lintas-sektor untuk percepatan capaian identitas hukum, termasuk pelayanan terpadu keliling untuk identitas hukum (isbat nikah, dsb.), integrasi akta kelahiran dengan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, serta kerjasama dengan lembaga mitra non-pemerintah (LPA NTB) untuk pelayanan identitas hukum berbasis masyarakat. Pelayanan akta kelahiran di rumah sakit berlangsung cepat (30 menit) dan *online*. Strategi lainnya adalah adanya Metode Jempolan (jemput berkas proses hasil langsung antar). Di Desa Loloan, misalnya, lebih dari 99 persen anak telah memiliki akta kelahiran dan menjadi desa percontohan di Kabupaten Lombok Utara.

Capaian target: Sebagaimana ditunjukkan data SIAK Kemendagri, capaian akta kelahiran untuk anak usia 0–18 tahun di Kabupaten Lombok Utara sangat signifikan yaitu 85 persen (data bulan Mei 2017), tertinggi di provinsi (rata-rata NTB 61 persen). Capaian ini telah melampaui target nasional (80 persen) untuk tahun 2017. Capaian ini meningkat cukup baik dari tahun sebelumnya yakni 64 persen (data bulan Mei 2016) sebelum adanya program Jaring PEKAT.



**Gambar 1**  
Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak  
Usia 0–18 tahun di Kabupaten Lombok Utara

#### ◆ Tingkat Kecamatan

- Peningkatan kapasitas:
- Pelatihan bagi para camat mengenai kepemimpinan, pelayanan dasar, dan inovasi.
- Pelatihan aparat kecamatan selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) terkait peran bimbingan teknis dan pengawasan tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa di delapan kecamatan yang didukung oleh KOMPAK, termasuk pengarusutamaan pelayanan dasar dalam perencanaan dan penganggaran desa. Para PTPD telah terlibat dalam memfasilitasi pengarusutamaan pelayanan dasar dalam forum musrenbang desa 2017 dan melakukan evaluasi terhadap RAPBDesa 2017.
- Adanya SK Camat tentang Tim PATEN Kecamatan.

Reformasi Pelayanan: Peningkatan pelayanan di kantor camat melalui PATEN, termasuk integrasi administrasi kependudukan dan identitas hukum.

Anggaran: Peningkatan alokasi anggaran kepada kecamatan sejalan dengan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Dengan keluarnya SK pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, sebanyak empat kecamatan mendapatkan tambahan anggaran masing-masing sebesar Rp200 juta, dan 1 kecamatan mendapatkan Rp600 juta

Koordinasi: Penyelenggaran koordinasi multi-pihak dan lintas-sektor untuk pelaksanaan dan pengawasan pembangunan umumnya dan pelayanan dasar khususnya, dan sudah mulai dengan pelibatan kader-kader desa yang berasal dari kelompok masyarakat, khususnya kelompok perempuan, disabilitas dan anak buruh migran.

#### ◆ Tingkat Desa

Sistem Informasi Desa (SID): Dukungan program dalam pengembangan SID telah direplikasi oleh Kabupaten Lombok Utara. Total 33 desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara sudah mempunyai SID *online*. Desa-desa telah memanfaatkan SID untuk mempermudah proses administrasi. Penguatan selanjutnya diperlukan untuk pengelolaan data/informasi dan pemanfaatannya untuk mendukung perencanaan pembangunan desa yang berbasis data/bukti. Proses interkoneksi dengan kabupaten sedang dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.

Alokasi belanja desa untuk pelayanan dasar: Alokasi belanja desa dalam APBDes untuk pelayanan dasar mengalami peningkatan yang signifikan—dari 14 persen pada 2016 menjadi 25 persen tahun 2017. Kabupaten Lombok Utara merencanakan untuk mengadopsi dan mereplikasi praktik baik pengarusutamaan pelayanan dasar ini untuk semua desa untuk tahun anggaran 2018

Transparansi anggaran dalam bentuk publikasi ringkasan anggaran desa pada baliho dan website sistem informasi desa (<http://www.loloan-lombokutara.desa.id/index.php/first>)



## Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan

*Sidang itsbat pada pelayanan kependudukan terpadu di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara*



### Relevansi Program, Keterlibatan, dan Komitmen Daerah

Berbeda dengan NTB yang dimulai akhir tahun 2015, dukungan KOMPAK di Kabupaten Pangkajene relatif lebih baru. Program KOMPAK dimulai di Provinsi Sulawesi Selatan sejak awal tahun 2016, namun masih terbatas pada ujicoba pelayanan dasar. Kehadiran program secara “penuh”—dengan rencana kerja dan anggaran yang memadai serta personil yang relatif lengkap—baru dimulai sejak awal tahun 2017.

Dukungan Program KOMPAK memperoleh penerimaan yang sangat baik oleh Pemkab Pangkajene Kepulauan, termasuk dari kepala daerah dan semua OPD terkait. Dukungan dari program dirasakan sangat relevan dengan visi-misi bupati dan prioritas daerah terkait dengan upaya peningkatan capaian pelayanan dasar.

Dukungan program saat ini dengan fokus pada pengembangan mekanisme untuk daerah kepulauan juga dipandang sangat relevan dengan karakteristik daerah secara keseluruhan, yang ditandai dengan banyaknya pulau-pulau kecil dan tersebar. Hasil dari dukungan program diharapkan dapat menjadi model dan direplikasi untuk wilayah-wilayah kepulauan lainnya.

Tim misi supervisi memperoleh kesan yang sangat baik mengenai rasa memiliki yang kuat dan keterlibatan aktif jajaran pemerintah daerah terkait dalam pelaksanaan dukungan program.

Secara kelembagaan, pelaksanaan dukungan Program KOMPAK dikoordinasikan melalui sebuah tim khusus, yaitu Tim Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Dukungan Program KOMPAK, yang dibentuk melalui SK Bupati, dengan pembiayaan dari anggaran pemerintah daerah. Koordinasi formal-reguler berlangsung dengan sangat baik, termasuk pertemuan dengan tim secara keseluruhan maupun dengan masing-masing OPD terkait. Kepala daerah juga terlibat langsung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dukungan program.

### Kemajuan dan Capaian

Ringkasan: Rencana kerja KOMPAK di Kabupaten Pangkajene Kepulauan terkait pelayanan dasar dalam garis besar mencakup: dukungan penguatan kecamatan, akselerasi capaian identitas hukum/administrasi kependudukan, dan penguatan tatakelola desa dan partisipasi masyarakat. Bentuk kegiatan termasuk fasilitasi penyusunan kebijakan/regulasi, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan, dukungan pelaksanaan dalam bentuk program pilot, termasuk kerjasama dengan lembaga mitra.

Secara umum dapat dikatakan bahwa rencana kerja dapat berjalan dengan baik, dengan sambutan penerimaan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan hasil-hasil kegiatan menunjukkan kemajuan yang berarti sejalan dengan capaian. Sebagai ilustrasi, kemajuan yang dicapai sampai waktu misi ini sangat signifikan bila dibandingkan dengan kunjungan bersama Bappenas dan KOMPAK pada

November 2016. Dalam pertemuan dengan tim misi supervisi, Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan menyampaikan ungkapan apresiasinya untuk dukungan yang baik yang diberikan selama

#### Demi Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Wilayah Kepulauan

"Dulu kami susah berobat ke puskesmas. Dokter tidak ada yang mau tinggal di pulau," tutur Jumsiah, warga Desa Mattiro Kanja, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Puskesmas Liukang Tupabbiring Utara terletak di Pulau Sabutung. Kepala Puskesmas Liukang Tupabbiring Utara, Ruslan mengakui awalnya pelayanan puskesmas masih bersifat pasif karena belum adanya komitmen dari staf pelayanan kesehatan. "Kami masih memosisikan diri sebagai pekerja bukan petugas. Pekerja bekerja untuk mendapatkan upah tidak ada semangat untuk melayani masyarakat," tuturnya.

Pada 2015, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara menjadi salah satu wilayah kerja KOMPAK di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Fokus utama KOMPAK di Kabupaten ini adalah membantu pemerintah daerah meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum) di empat kecamatan di wilayah kepulauan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan model sumber daya manusia dan sistem manajemen berbasis kinerja.

KOMPAK bersama pemerintah daerah mendorong perbaikan pelayanan di puskesmas. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan manajemen pelayanan dasar, pelatihan manajemen puskesmas dan pelatihan PTPD (Pembina Teknis Pemerintahan Desa). "KOMPAK selalu memberi saran untuk mewujudkan puskesmas ramah anak dan peduli pada kebutuhan kelompok rentan," terang Ruslan. KOMPAK pun mendorong kolaborasi antara puskesmas dengan Pemerintah Desa Mattiro Kanja.

"Saat ini layanan puskesmas sudah jauh lebih baik," tutur Muzakkir, Kepala Desa Mattiro Kanja. Menurutnya, layanan kesehatan di puskesmas lebih terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada peningkatan kondisi kesehatan masyarakat.

#### Jan-Des 2016 (periode 12 bulan)

Jumlah kunjungan pasien	1032 orang
Jumlah kunjungan ibu hamil	184 orang
Jumlah pasien rawat inap	2 orang
Rata-rata pasien	3-5 orang/hari

#### Jan-Juni 2017\* (periode 6 bulan)

Jumlah kunjungan pasien	1421 orang
Jumlah kunjungan ibu hamil	184 orang
Jumlah pasien rawat inap	5 orang
Rata-rata pasien	10-40 orang/hari

\* Setelah KOMPAK bersama Dinas Kesehatan aktif memberikan pendampingan

Sumber: Kepala Puskesmas Liukang Tupabbiring Utara

## ◆ Tingkat kabupaten

Kebijakan dan regulasi: Fasilitasi dan dukungan terhadap pengembangan dan revisi berbagai peraturan (Peraturan Bupati dan SK Bupati) terkait dengan:

- Peraturan Bupati tentang perencanaan pembangunan desa;
- Peraturan Bupati tentang penguatan tatakelola desa (pengelolaan keuangan, kewenangan desa, pengadaan barang dan jasa di desa, harga satuan desa, Sistem Informasi Desa, BUMDES dan teknologi tepat guna, percepatan pembangunan kawasan perdesaan);
- Rancangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif; dan
- Rancangan Perda mengenai BPD.

Akselerasi identitas hukum: Dukungan program untuk percepatan capaian identitas hukum/administrasi kependudukan melalui pelayanan keliling multi-sektor secara terpadu di Kecamatan Liukang Tupabiring Utara yang didukung Program KOMPAK akan direplikasi oleh pemerintah kabupaten untuk semua kecamatan dengan anggaran daerah sendiri (APBD). Inisiatif replikasi ini disebut Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan (GERTAK) dan sudah diprogramkan untuk tahun anggaran 2018.

## ◆ Tingkat Kecamatan

Perbaikan pelayanan di puskesmas: Pelayanan di Puskesmas Sabutung, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Puskesmas yang tahun lalu dikenal masyarakat sebagai Puskesmas 'angker', tidak pernah didatangi warga, dan tidak dihuni oleh kepala puskesmas bersama stafnya kini telah berubah menjadi puskesmas dengan kualitas layanan yang jauh lebih baik. Hal ini ditandai dengan adanya jadwal pelayanan yang lebih teratur, kondisi fisik puskesmas yang lebih asri dan ramah pengunjung, papan informasi yang menunjukkan apa saja yang menjadi hak-hak pasien dan kewajiban pengelola puskesmas. Kepala puskesmas dan tenaga kesehatan lainnya kini tinggal di rumah dinas yang terletak di lingkungan puskesmas. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan ke puskesmas serta layanan *outreach* ke pulau-pulau di sekitar puskesmas.

Reformasi pelayanan di kantor camat: Selain di puskesmas, perbaikan layanan juga dapat dilihat di kantor Kecamatan Liukang Tupabiring Utara. Sebelum adanya dukungan KOMPAK melalui pendampingan dan pelatihan camat, kantor camat tampak tidak terawat dan masyarakat jarang sekali datang ke kantor camat untuk mendapatkan layanan administrasi. Saat ini kantor Camat tampak lebih tertata, lebih bersih, dan dikelola dengan lebih profesional. Salah satu jenis layanan yang kini dapat diakses oleh masyarakat adalah pelayanan terpadu pengurusan berbagai dokumen identitas hukum, termasuk akta pernikahan yang diperoleh melalui itsbat nikah, akta kelahiran, E-KTP, dan Kartu Keluarga. Sebagai tindak lanjut pelayanan terpadu ini, secara khusus Camat Liukang Tupabiring Utara juga memiliki gagasan untuk pelayanan terpadu bergerak dengan menggunakan perahu yang dinamakan PERAHU PEKAT. Inovasi ini adalah usulan camat sebagai hasil dari pelatihan penguatan peran kecamatan dalam pelayanan dasar yang diprakarsai oleh KOMPAK.

Deklarasi komitmen bersama untuk pelayanan dasar: Camat Liukang Tupabiring Utara dan semua kepala desa di wilayahnya menyepakati suatu deklarasi bersama: Nota Kesepakatan dan Komitmen Bersama untuk Pengarusutamaan Pelayanan Dasar dalam Perencanaan dan Penganggaran. Deklarasi

tersebut pada dasarnya untuk meneguhkan komitmen pengarusutamaan pelayanan dasar dalam tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa, dan antara lain memuat: pengembangan sistem informasi desa, termasuk *database* dengan tim data dari desa dan dibiayai desa; melaksanakan pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan desa dan kerjasama dengan unit pelayanan: pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyelenggaraan PAUD; membantu pelayanan identitas hukum bagi semua warga; memastikan pelayanan penyandang disabilitas; menyediakan akses informasi penggunaan anggaran desa; peningkatan pelayanan kantor camat. Kesepakatan tersebut akan jadi pegangan para pihak untuk memantau kemajuan pelayanan.

#### ◆ Tingkat Desa

Partisipasi dan inklusi sosial: Difasilitasi oleh lembaga mitra program, di tingkat masyarakat telah mulai terlihat partisipasi kelompok perempuan dan kelompok disabilitas secara khusus dalam proses pembangunan desa. Kedua kelompok ini mulai menyadari pentingnya kepemilikan identitas hukum untuk dapat mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam pelayanan terpadu yang dilakukan di kantor camat, pelayanan E-KTP diberikan kepada sejumlah kelompok disabilitas.


Pengalokasian anggaran Dana Desa: Selain itu sebagian alokasi anggaran Dana Desa juga telah diperuntukkan bagi kelompok perempuan dan kelompok disabilitas. Data jumlah kelompok masyarakat disabilitas, dan kebutuhan dari kelompok disabilitas sudah masuk di dalam target prioritas RPJMDes dan APBDDes 2017 di desa. Seorang penyandang disabilitas mengatakan akan menggunakan identitas hukum yang telah diperolehnya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Diskusi kelompok disabilitas dan diskusi kelompok perempuan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali untuk membahas isu-isu pembangunan di desa, termasuk kepentingan kaum disabilitas dan perempuan, yang perlu diadvokasi untuk masuk dalam perencanaan dan penganggaran di desa. Diskusi-diskusi reguler ini membantu anggota kelompok untuk melatih berbicara dan mengemukakan pendapat.

---

PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI  
PENINGKATAN PELAKSANAAN  
PROGRAM KOMPAK

---



---

Pentingnya membangun hubungan: Hubungan yang baik, kepercayaan, dan fasilitasi yang efektif oleh tim KOMPAK di tingkat provinsi dan kabupaten merupakan salah satu faktor yang penting untuk penerimaan dan dukungan oleh pemerintah daerah terhadap program. Secara berkala Tim KOMPAK dan pemerintah daerah melalui Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten berdiskusi mengenai kemajuan dan tantangan dari implementasi program yang dilaporkan ke bupati. Tim misi supervisi di kedua daerah memberikan apresiasi untuk kerjasama yang sangat baik antara Tim KOMPAK dengan masing-masing pemerintah daerah dan mengharapkan untuk terus dipertahankan.

Pentingnya harmonisasi dukungan kebijakan: Dukungan program di tingkat pusat dan daerah perlu diselaraskan. Beberapa kegiatan di daerah memerlukan dukungan regulasi di tingkat pusat yang masih dalam tahap finalisasi, antara lain terkait pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk pelayanan dasar yang berhubungan dengan peran pembina teknis aparat kecamatan untuk penguatan tatakelola pemerintahan desa.

Peningkatan kapasitas berkesinambungan: Kegiatan peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara berkesinambungan, sebagaimana ilustrasi berikut:

- Pengembangan sistem informasi desa perlu diikuti oleh penguatan pengelolaan data/informasi dan pemanfaatannya untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- Pelatihan untuk camat dan kepala desa perlu “penyegaran”, sekaligus memfasilitasi pelatihan yang terkait dengan perkembangan kebijakan terbaru, dan selain pengetahuan teknis, materinya sebaiknya juga termasuk *soft skills*, seperti kepemimpinan dan keterampilan komunikasi.
- Pelatihan PTPD dengan melibatkan unit layanan dan pendamping desa dengan fokus penguatan kemampuan fasilitasi aparatur desa membedah permasalahan pelayanan dasar.
- Pelimpahan kewenangan kepada camat dan penambahan alokasi anggaran kepada kecamatan sebaiknya diikuti dengan penguatan kapasitas untuk melaksanakan kewenangan dan anggaran tersebut.
- Perlu penguatan kapasitas, termasuk peran bimbingan teknis dan pengawasan, dari provinsi dan kabupaten secara berjenjang untuk dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada kecamatan dan desa.

Peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan difabel: Kegiatan peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara berkesinambungan, sebagaimana ilustrasi berikut:

- Penguatan kapasitas kelompok perempuan dan disabilitas dengan menggunakan pendampingan *Civil Society Organization* (CSO) lokal.



- Memastikan pengarusutamaan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (*Gender Equality and Social Inclusion*, GESI) di dalam pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas unit layanan dan aparaturnya kecamatan, melalui pelibatan kelompok perempuan dan disabilitas sebagai narasumber.
- Pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam penguatan kelompok perempuan dan disabilitas.
- Forum-forum kecamatan melibatkan perwakilan dari kelompok perempuan dan disabilitas dalam koordinasi pelayanan dasar di kecamatan oleh camat.

Dokumentasi praktik baik dan replikasi oleh pemerintah daerah: Dukungan dari program sifatnya dalam skala yang terbatas. Tanda-tanda praktik baik sudah mulai terlihat dan bahkan telah—atau direncanakan—direplikasi oleh pemerintah daerah dengan sumber daya sendiri (akselerasi capaian target identitas hukum/administrasi kependudukan; pengembangan sistem informasi desa; pengarusutamaan pelayanan dasar di desa; dsb.). Replikasi tersebut dapat berlangsung dalam wilayah kabupaten dan juga bisa bersifat antarkabupaten. Strategi Kabupaten Lombok Utara dalam akselerasi capaian identitas hukum, misalnya, melalui suatu forum pertukaran pengalaman, diadopsi oleh Kabupaten Bima; begitu juga sukses dalam pengembangan sistem informasi desa telah menginspirasi kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi NTB. Untuk itu, diperlukan pendokumentasian yang sistematis mengenai praktik-praktik baik sehingga dapat dengan mudah direplikasi oleh daerah dengan menggunakan APBD ataupun DAK.

Optimalisasi peran provinsi: Tim koordinasi tingkat provinsi mempunyai peran yang penting dalam tatakelola program. Provinsi juga dapat berperan untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman, termasuk praktik-praktik baik, yang bersifat antarkabupaten—selain melaksanakan peran pemantauan perkembangan pelaksanaan program. Di Provinsi NTB, misalnya, telah terbentuk forum antardaerah dengan tema identitas hukum/administrasi kependudukan. Peran tim provinsi masih dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk mendorong pertukaran pengalaman dan replikasi praktik baik untuk semua daerah di wilayahnya.

Umpan-balik terkait tatakelola program dan pelaksanaan misi supervisi: Anggota tim mempunyai tingkat keterlibatan yang tidak sama dalam program; untuk sebagian, kesempatan misi ini merupakan keterlibatan yang pertama. Sementara itu, jenis dan jumlah/variasi kegiatan dukungan secara terinci relatif signifikan. Pembelajaran dari misi ini menyarankan hal-hal berikut:

- Perlu dokumentasi yang kegiatan lebih baik. Kementerian, khususnya yang menjadi anggota Komite Teknis perlu memperoleh informasi pelaksanaan kegiatan.
- Untuk penyelenggaraan misi supervisi berikutnya:
  - ◆ Perlu pemaparan mengenai perkembangan program secara keseluruhan dan per daerah yang dikunjungi pada awal misi supervisi.
  - ◆ Perlu meningkatkan keterlibatan tim provinsi mitra strategis program dalam perencanaan dan pelaksanaan misi supervisi. Disarankan ada pertemuan khusus tim supervisi dengan tim teknis provinsi.
  - ◆ Waktu pelaksanaan, khususnya kunjungan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, perlu disediakan lebih memadai.



—

# REKOMENDASI PRIORITAS BARU

—



---

Berdasarkan observasi dan diskusi selama misi supervisi, termasuk usulan dari pemerintah daerah, tim merekomendasikan kepada KOMPAK untuk memberikan dukungan terkait:

- Tatakelola sektor pendidikan—dukungan spesifik dapat disesuaikan dengan konteks permasalahan dan prioritas rencana setiap daerah.
- Akreditasi puskesmas, termasuk pengembangan mekanisme penanganan keluhan/pengaduan untuk mengelola umpan-balik dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.
- Analisis alokasi anggaran kecamatan untuk mendukung pelaksanaan pelimpahan kewenangan.

— Khusus untuk Kabupaten Pangkajene Kepulauan —

- Operasionalisasi pendekatan “Desa Mandiri”, yang merupakan program unggulan kabupaten, khususnya prioritas yang sejalan dengan kerangka KOMPAK dalam pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi.
- Pengembangan model pelayanan dasar inovatif, khusus untuk wilayah dengan karakteristik kepulauan —pulau-pulau kecil yang terpencar dengan aksesibilitas sulit: pelayanan kesehatan keliling, pendidikan, dan identitas hukum.

— Rekomendasi khusus untuk Kabupaten Lombok Utara —

- Perlu dijajaki kemungkinan pengembangan usaha desa untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan dengan berbasis potensi sumber daya alam dan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara.



---

# RINGKASAN DAN KESIMPULAN

---

Berdasarkan uraian di atas, komitmen tinggi dan keterlibatan dari pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa baik di Kabupaten Lombok Utara maupun Kabupaten Pangkajene Kepulauan untuk dukungan KOMPAK sangat terlihat. Hal ini sejalan dengan visi misi bupati yang memiliki perhatian pada pelayanan dasar, sehingga mendukung percepatan penguatan pelayanan dasar di wilayahnya. Kerjasama yang terstruktur terjadi antara masyarakat dan pemerintah sehingga mendorong perbaikan akses, kualitas, dan pelayanan dasar yang lebih akuntabel. Berdasarkan hasil kunjungan beberapa capaian utama dalam implementasi kegiatan yakni mengenai kepemilikan identitas hukum yang meningkatkan capaian kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0–18 tahun menjadi 84,72 persen. Inisiatif pelayanan terpadu yang dijalankan di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (kecamatan binaan KOMPAK) juga kini telah direplikasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Pangkep.

Perbaikan di unit layanan terlihat dari meningkatnya pelayanan di Puskesmas Sabutung Kabupaten Pangkep dengan kehadiran petugas kesehatan dan staf puskesmas yang berdampak positif pada meningkatnya jumlah kunjungan ke puskesmas serta layanan *outreach* ke pulau-pulau sekitar. Begitupun halnya pelayanan di tingkat kecamatan di mana terlihat adanya perubahan dalam sistem layanan dan kelembagaan. Di kantor Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara misalnya, pengelolaan pelayanan masyarakat menjadi lebih profesional. Pelayanan kecamatan terpadu melalui PATEN di Kabupaten Lombok Utara juga mempermudah akses masyarakat dalam mengurus berbagai identitas hukum langsung di kantor kecamatan, tanpa harus menuju ibukota kabupaten.

Dukungan program di tingkat desa mulai dari penguatan regulasi mengenai desa hingga implementasi peningkatan partisipasi masyarakat juga mendorong adanya perbaikan sistem dan kelembagaan. Advokasi yang dilakukan kepada masyarakat rentan dan kelompok terpinggirkan mulai terlihat dengan terbentuknya forum untuk berdiskusi dan berdialog bagi kaum disabilitas (misalnya di Kabupaten Pangkep).

Rekomendasi perbaikan dan fokus Program KOMPAK ke depan meliputi:

- 1 Perlunya harmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah, termasuk regulasi mengenai delegasi sebagian kewenangan dari kabupaten ke kecamatan, Pembina Teknis Pemerintahan Desa, PP mengenai kecamatan, dan lainnya.
- 2 Dengan pembelajaran yang diambil dari dukungan KOMPAK, pemerintah provinsi dapat mengarahkan daerah non-KOMPAK untuk mereplikasi praktik baik yang telah dijalankan di daerah binaan. Replikasi praktik baik juga dapat diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten daerah binaan kepada kecamatan dan desa-desa di wilayahnya dengan menggunakan dana APBD dan dana lainnya (misalnya dari DAK nonfisik). Untuk itu, KOMPAK perlu mendokumentasikan praktik-praktik baik.
- 3 Penguatan dukungan agar SID dapat menjadi basis perencanaan dan penganggaran sehingga dapat meningkatkan tata kelola pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi.
- 4 Penguatan dukungan untuk pengembangan tatakelola di sektor pendidikan.
- 5 Penguatan dukungan untuk akreditasi puskesmas, termasuk pengembangan mekanisme penanganan keluhan/pengaduan untuk mengelola umpan-balik dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.
- 6 Kajian alokasi anggaran kecamatan untuk mendukung pelaksanaan pelimpahan kewenangan.

LAMPIRAN

---

## Lampiran 1

### Kerangka Acuan

#### Latar Belakang

KOMPAK adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan strategi Pemerintah Indonesia untuk memperluas dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai bagian dari pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan KOMPAK di lapangan, sebuah misi dukungan implementasi program KOMPAK akan dilaksanakan setiap 6 bulan dengan melibatkan perwakilan dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

#### Tujuan

Adapun tujuan utama dari misi ini adalah:

- Melakukan ulasan terhadap capaian program
- Identifikasi praktik-praktik baik dan pembelajaran
- Identifikasi perbaikan yang perlu dilakukan
- Identifikasi cerita perubahan

#### Ruang Lingkup dan Metode Kegiatan

Pelaksanaan misi ini akan berlangsung setidaknya 3-4 hari di masing-masing provinsi.

- Pada hari pertama, tim akan berangkat dari Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pembagian tim dan briefing persiapan mengenai gambaran kegiatan yang akan diobservasi dan eksplorasi.
- Pada hari kedua, kegiatan diawali dengan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan masing-masing tim baik di tingkat kecamatan maupun desa.
- Pada hari ketiga, masing-masing tim akan melakukan diskusi kelompok yang dilanjutkan dengan mini workshop untuk mendiskusikan hasil temuan dan pembelajaran serta mengembangkan rencana tindak lanjut dan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Masing-masing akan dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan sejalan dengan capaian menengah KOMPAK, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar.

Adapun ruang lingkup materi dari kegiatan mencakup:

- Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk pelayanan dasar
- Identifikasi praktik baik terkait pemanfaatan Dana Desa untuk pelayanan dasar
- Inovasi lokal baik dari sistem maupun prosedur dari Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelayanan dasar.

- Pemahaman tim terkait dengan implementasi kegiatan daerah diantaranya dilihat dari sisi: 1) keterlibatan dan kepemilikan Pemda, 2) kesesuaian kegiatan yang diimplementasikan dengan capaian KOMPAK, dan 3) implementasi kegiatan di daerah termasuk mekanisme monitoring dan evaluasinya.

### Output Kegiatan

- Laporan mengenai capaian provinsi lokasi kunjungan, pembelajaran, dan cerita perubahan
- *After Event Report (AER)* yang merangkum kegiatan misi dan menggambarkan langkah selanjutnya

### Agenda

Hari/tanggal	Kegiatan	Lokasi
Senin, 5 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berangkat dari Jakarta</li> <li>▪ Pembagian tim dan briefing persiapan termasuk output dan hasil kegiatan yang ingin dicapai</li> </ul>	Lokasi 1: Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Selasa, 6 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diskusi bersama Pemda setempat</li> <li>▪ Kunjungan lapangan</li> </ul>	
Rabu, 7 Juni 2017	Masing-masing tim menyampaikan hasil temuan kemajuan di lapangan, praktik baik, pembelajaran dan rekomendasi perbaikan	Lokasi 2: Provinsi NTB Kabupaten Lombok Utara
Kamis, 8 Juni 2017	Kembali ke Jakarta	

## Lampiran 2

### Jadwal Kegiatan Kabupaten Lombok Utara

Jam	Kegiatan	Catatan Detail Kegiatan	Tempat	PIC
Hari ke-1 : Senin, 5 Juni 2017				
11.00 - 14.05	Fly Jakarta – Lombok/Mataram			
15.00	Hotel Check in			
16.00 - 18.00	Briefing tim dan dilanjutkan dengan buka puasa	Diskusi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tujuan misi dukungan implementasi, hasil yang diharapkan, pertanyaan kunci dalam menggali informasi di lapangan</li> <li>· Detail agenda termasuk protokol mengenai pertemuan dengan Bupati dan tim teknis, kunjungan ke kecamatan, unit pelayanan dan masyarakat/desa</li> <li>· Gambaran kegiatan/intervensi yang akan diobservasi dan dieksplorasi</li> <li>· Pembagian tim</li> </ul>	Hotel Santika	Outcome Lead, KOMPAK NTB, KOMPAK Jakarta
Hari ke-2 : Selasa, 6 Juni 2017 Kunjungan ke Kabupaten Lombok Utara				
08.00 - 09.00	Perjalanan ke Kabupaten Lombok Utara			
09.00 - 11.00	Pertemuan Ramah Tamah dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Tim Teknis Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan mengenai tujuan kunjungan, agenda, dsb</li> <li>▪ Paparan singkat Bupati dan Tim Teknis Kabupaten terkait kondisi Kab.Lombok Utara dan hasil dukungan program KOMPAK oleh Tim Teknis.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguatan kecamatan untuk pelayanan dasar (SK Bupati dan alokasi anggaran kecamatan).</li> <li>✓ Penguatan tata kelola desa untuk pelayanan dasar</li> <li>✓ Integrasi SPM kedalam RPJMD</li> <li>✓ Percepatan Kepemilikan Identitas Hukum</li> <li>✓ Peran Tim Teknis Kabupaten</li> <li>✓ Harapan kedepan terhadap Program KOMPAK</li> </ul> </li> </ul>	Kantor Bupati	KOMPAK NTB

Jam	Kegiatan	Catatan Detail Kegiatan	Tempat	PIC
11.00-11.50	Kunjungan ke RSUD Kabupaten Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melihat simulasi Akta kelahiran On-line (integrasi antara RSUD dengan Dukcapil), Bank Nama Anak, dll.</li> </ul>	RSUD Tanjung	
12.00-12.40	Persiapan Kunjungan lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sholat Dzuhur</li> <li>Lunch bagi yang tidak puasa (Lunch Box disediakan)</li> </ul>		
12.40-16.00	<p>Kunjungan Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim 1 : Menuju Kecamatan Bayan <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kantor Camat Bayan</li> <li>✓ Desa Loloan (LPA)</li> </ul> </li> <li>Tim 2 : Menuju Kecamatan Pemenang <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kantor kecamatan Pemenang</li> <li>✓ Kunjungan ke desa Pemenang Timur</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan ke Kantor Kecamatan Bayan:(alokasi waktu 20 menit) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diskusi dengan Pak Camat dan Staf terkait pelayanan PATEN</li> <li>✓ Diskusi dengan staf kecamatan terkait peningkatan kapasitas PTPD untuk pelayanan dasar.</li> </ul> </li> <li>Kunjungan ke Desa Loloan: Presentasi singkat Kepala Desa terkait dengan kondisi desa dan hasil kegiatan KOMPAK seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capaian Identitas Hukum, Istbat Nikah, proses yang terjadi di masyarakat.</li> <li>✓ Proses pendampingan PTPD dalam perencanaan APBDESA untuk pelayanan dasar</li> <li>✓ Sistem Informasi Desa untuk pelayanan administrasi dan transparansi.</li> <li>✓ Lainnya</li> </ul> </li> <li>Kunjungan ke Kantor Kecamatan Pemenang:(alokasi waktu 20 menit) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diskusi dengan Pak Camat dan Staf terkait kegiatan peningkatan kapasitas Camat untuk pelayanan dasar.</li> <li>✓ Melihat proses pelayanan PATEN</li> </ul> </li> <li>Kunjungan ke Desa Pemenang Timur: Presentasi singkat Kepala Desa terkait dengan kondisi desa dan hasil dukungan Program KOMPAK seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Proses pendampingan PTPD dalam perencanaan RKPDesa yang menghasilkan peningkatan alokasi pelayanan dasar dalam APBDesa.</li> <li>✓ Capaian Identitas Hukum, Istbat Nikah, proses yang terjadi di masyarakat.</li> <li>✓ Pelayanan administrasi, data dan transparansi menggunakan Sistem Informasi Desa</li> <li>✓ Lainnya</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Bayan</li> <li>Desa Loloan</li> <li>Kecamatan Pemenang</li> <li>Desa Pemenang Timur</li> </ul>	KOMPAK NTB



Jam	Kegiatan	Catatan Detail Kegiatan	Tempat	PIC
16.00-17.00	Kembali ke Mataram			
18.00-19.30	Buka Puasa bersama	Semua anggota mission	Rumah Makan Langko	Rani

Hari ke-3 : Rabu, 7 Juni 2017  
Workshop Hasil Temuan Lapangan dan Rekomendasi

09.00-10.00	Diskusi Kelompok oleh Mission Tim	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perumusan hasil temuan kunci dan rekomendasi untuk penyempurnaan intervensi KOMPAK</li> <li>▪ Persiapan presentasi</li> </ul>	Hotel Santika	KOMPAK Jakarta, KOMPAK NTB
10.00-12.00	<p>Mini workshop: presentasi hasil temuan, diskusi dan pengembangan rekomendasi</p> <p>Peserta :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perwakilan Tim Teknis Kabupaten Lombok Utara</li> <li>✓ Perwakilan Tim Teknis Kabupaten Lombok Timur</li> <li>✓ Perwakilan Tim Teknis Provinsi</li> <li>✓ Mitra Strategis (SOMASI, LPA, IRE, PEKKA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementasi program – kemajuan implementasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kualitas dan hasil dari implementasi</li> <li>✓ Relevansi dengan konteks lokal, dukungan dari Pemda dan potensi perluasan kegiatan</li> <li>✓ Hambatan (sumber daya, implementasi) dan rekomendasi</li> </ul> </li> <li>▪ Keterlibatan pemangku kepentingan dan peran KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kontribusi dan keterkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah</li> <li>✓ Keterlibatan Pemda</li> <li>✓ Mekanisme dan peran tim teknis provinsi dan kabupaten</li> <li>✓ Pendokumentasikan dan umpan balik kepada pemangku kepentingan tingkat nasional</li> </ul> </li> </ul>	Hotel Santika	KOMPAK Jakarta, KOMPAK NTB
12.00-13.00	Istirahat			
13.00-16.00	Mini workshop lanjutan: Refleksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Refleksi <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Intervensi seperti apa yang berjalan, pembelajaran</li> <li>✓ Arahkan ke depan</li> <li>✓ Implikasi terhadap prioritas rencana kerja ke depan</li> <li>✓ Wrap up – tindak lanjut</li> </ul> </li> </ul>		
18.00-19.30	Buka Puasa bersama	Semua anggota mission	Rumah Makan Ayam Taliwang	Rani

Hari ke-4 : Kamis, 8 Juni 2017

Morning	Tim kembali ke Jakarta			
---------	------------------------	--	--	--

## Lampiran 3

### Jadwal Kegiatan kabupaten Pangkajene Kepulauan

Jam	Kegiatan	Catatan Detail Kegiatan	Tempat	PIC
Hari ke-1 : Senin, 5 Juni 2017				
11.00 - 14.05	Fly Jakarta – Makassar			
15.00	Hotel Check in		Hotel Aston Makassar	
16.30 - 18.30	Briefing tim dan dilanjutkan dengan buka puasa	Diskusi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tujuan misi dukungan implementasi, hasil yang diharapkan, pertanyaan kunci dalam menggali informasi di lapangan</li> <li>· Detail agenda termasuk protokol mengenai pertemuan dengan Bupati dan tim teknis, kunjungan ke kecamatan, unit pelayanan dan masyarakat/desa</li> <li>· Gambaran kegiatan/intervensi yang akan diobservasi dan dieksplorasi</li> <li>· Pembagian tim</li> </ul>	RM Makan New Dinar	Outcome Lead, KOMPAK NTB, KOMPAK Jakarta
Hari ke-2 : Selasa, 6 Juni 2017 Kunjungan ke Kabupaten Pangkep				
08.00 - 09.00	Perjalanan ke Kabupaten Pangkep			
09.00 - 11.00	Pertemuan Ramah Tamah dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Tim Teknis Kabupaten – seluruh tim	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan mengenai tujuan kunjungan, agenda, dsb</li> <li>▪ Perkembangan dan hasil dukungan program KOMPAK di Kab. Pangkep               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diskusi Model Pelayanan Dasar Berbasis Kepulauan (Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan di Kab. Pangkep)</li> <li>✓ Dukungan dan Peran Tim Teknis Kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>✓ Pendampingan</li> <li>✓ Harapan Pemda terhadap dukungan Kompak</li> </ul> </li> </ul>	Ruang Rapat Bupati/Wakil Bupati - Kantor Bupati	KOMPAK Sulsel
10.00 – 10.30	Perjalanan dari Kantor Bupati Ke Dermaga Maccini Baji			

Jam	Kegiatan	Catatan Detail Kegiatan	Tempat	PIC
10.30-11.00	Menyeberang ke Pulau Sabutung Ibukota Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	Menggunakan Perahu dengan kapasitas 20 orang + masing-masing penumpang menggunakan pelampung sesuai standar keselamatan	Dermaga Maccini Baji Labakkang	KOMPAK Sulsel
11.00-1200	PELAYANAN TERPADU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (E-KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, SIDANG ISBAT PERNIKAHAN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bentuk kongkrit dari pencaanangan Gerakan tuntas Administrasi Kependudukan</li> <li>▪ Bagaimana Proses pelayanan perekaman E-KTP, Akta Kelahiran dan KK</li> <li>▪ Interview dengan <i>beneficeries</i> tentang pelayanan terpadu Adminduk</li> <li>▪ Tantangan dan dinamika</li> <li>▪ Proses yang terjadi awal hingga pelaksanaan sehingga ada kesepakatan melakukan pelayanan terpadu di Pulau</li> <li>▪ Follow up dari Pencaanangan Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan</li> </ul>	Dermaga Maccini Baji Labakkang	KOMPAK Sulsel
12.00 - 13.00	Istirahat /Shalat Dhuhur			
13.00-15.00	DISKUSI DI PUSKESMAS SABUTUNG DAN KANTOR CAMAT LIUKANG TUPABBIRING UTARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diskusi dengan pimpinan dan staf puskesmas 'sebelum dan sesudah' pendampingan Kompak</li> <li>▪ Diskusi dengan Camat dan Staf perubahan yang terjadi setelah adanya intervensi Kompak</li> <li>▪ Penjelasan Pak Camat tentang Komitmen yang telah dibangun bersama Desa dalam bentuk MoU terkait dengan: Pengarustamaan Pelayanan Dasar dalam Perencanaan Dan Penganggaran Perbup yang akan di Review dan membuat baru: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup tentang pedoman perencanaan desa (membuat baru)</li> <li>2. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa. (revisi)</li> <li>3. Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di Desa (membuat baru)</li> </ol> </li> </ul>	Dermaga Maccini Baji Labakkang	KOMPAK Sulsel

Jam	Kegiatan	Catatan Detail Kegiatan	Tempat	PIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan Kades Matiro Kanja dan Mattiro Baji terkait ADD yang dialokasikan untuk pelayanan Dasar APBD 2017</li> </ul>		
15.00 – 17.00	Tim 1: DISKUSI KAMPUNG PEREMPUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan di desa</li> <li>Proses pendampingan yang dilakukan oleh YASMIB dalam penguatan Perempuan</li> <li>Tantangan perempuan Pulau dalam mengakses layanan dasar</li> <li>Penyadaran terhadap kaum perempuan mengenai hak haknya dalam mendapatkan pelayanan dasar</li> </ul>	Kantor Desa Mattiro Kanja	
15.00 – 17.00	Tim 2: DISKUSI KAMPUNG DISABILITAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan di desa</li> <li>Proses pendampingan yang dilakukan oleh YASMIB dalam penguatan Penyandang Disabilitas</li> <li>Tantangan Penyandang Disabilitas Pulau dalam mengakses layanan dasar</li> <li>Penyadaran terhadap kaum Disabilitas mengenai hak haknya dalam mendapatkan pelayanan dasar</li> </ul>	Desa BPD Mattiro Kanja	Kompak Sulsel, dengan berkoordinasi dengan Yasmib, Tim Teknis
17.00 - 18.30	MENUNGGU WAKTU BUKA PUASA BERSAMA DI PULAU			
18.30 – 19.00	Menyeberang dari Sabutung ke Dermaga Mattiro Baji		Dermaga Sabutung	
19.00 – 20.30	Perjalanan ke Makassar			

Hari ke-3 : Rabu, 7 Juni 2017  
Workshop Hasil Temuan Lapangan dan Rekomendasi

08.30 – 10.00	Diskusi Kelompok oleh Mission Tim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan hasil temuan kunci dan rekomendasi untuk penyempurnaan intervensi KOMPAK</li> <li>Persiapan presentasi</li> </ul>	Ruang Rapat Bappeda Pangkep	KOMPAK Jakarta, KOMPAK Sulsel
---------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------

Jam	Kegiatan	Catatan Detail Kegiatan	Tempat	PIC
10.00 – 12.00	MINI WORKSHOP <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi Hasil Temuan Lapangan</li> <li>Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi program – kemajuan implementasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kualitas dan hasil dari implementasi</li> <li>✓ Relevansi dengan konteks lokal, dukungan dari Pemda dan potensi perluasan kegiatan</li> <li>✓ Hambatan (sumber daya, implementasi) dan rekomendasi</li> </ul> </li> <li>Keterlibatan pemangku kepentingan dan peran KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kontribusi dan keterkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah</li> <li>✓ Keterlibatan Pemda</li> <li>✓ Mekanisme dan peran tim teknis provinsi dan kabupaten</li> <li>✓ Pendokumentasikan dan umpan balik kepada pemangku kepentingan tingkat nasional</li> </ul> </li> </ul>	Ruang Rapat Bappeda Pangkep	KOMPAK Jakarta, KOMPAK Sulsel
12.00 - 13.30	Istirahat/Shalat			
13.30- 17.00	MINI WORKSHOP LANJUTAN: REFLEKSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refleksi <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Intervensi seperti apa yang berjalan, pembelajaran</li> <li>✓ Arahkan ke depan</li> <li>✓ Implikasi terhadap prioritas rencana kerja ke depan</li> </ul> </li> <li>Wrap up – tindak lanjut</li> </ul>	Ruang Rapat Bappeda Pangkep	KOMPAK Jakarta, KOMPAK Sulsel
17.00 – 18.00	PERSIAPAN BUKA PUJASA BERSAMA			
Hari ke-4 : Kamis, 8 Juni 2017				
Morning	Tim kembali ke Jakarta			

---

## Lampiran 4 Daftar Peserta

No	Nama Lengkap	Organisasi
1	Mahatmi Parwitasari Saronto	Bappenas
2	Asep Saepudin	Bappenas
3	Ikrar Gumilar	Bappenas
4	Nugroho	Kemenko PMK
5	Efriyazwar	Kemenkeu
6	Faisal Syarif	Kemendagri
7	Muhamad Arif Hidayat	Kemendagri
8	Rizari	Kemendagri
9	Budi	Kemendagri
10	Reza	Kemendagri
11	Grace M. Putri	Kemendes
12	Eko Setiono	DFAT
13	Kate Shanahan	KOMPAK
14	Irfani Darma	KOMPAK
15	Erny Murniasih	KOMPAK
16	Dewi Sudarta	KOMPAK
17	Dimitra Viantari	KOMPAK
18	Benedicta Kirana	KOMPAK

Nusa Tenggara Barat

## Sulawesi Selatan

No	Nama Lengkap	Keterangan
1	Aryawan Soetiarso Poetro	Bappenas
2	Alen Ermanita	Bappenas
3	Sri Roshidayati	Bappenas
4	Moris Nuaimi	Bappenas
5	Dedy Siswoyo Setiawan	Kemenko PMK
6	Edi Cahyono	Kemendagri
7	Nelson Simanjuntak	Kemendagri
8	Valentinus Sudarjanto Sumito	Kemendagri
9	Neryl Lewis	DFAT
10	Astrid Kartika	DFAT
11	Anna Winoto	KOMPAK
12	Ted Weohau	KOMPAK
13	Deswanto Marbun	KOMPAK
14	Dewi Fatmaningrum	KOMPAK
15	Paulus Enggal Sulaksono	KOMPAK
16	Sentot Satria	KOMPAK











# KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan*

---

Jalan Diponegoro No.72  
Jakarta Indonesia, 10320  
Tel +62 21 8067 5000  
Fax +62 21 3190 3090  
Email [info@kompak.or.id](mailto:info@kompak.or.id)  
[www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)